



Implementasi Kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan Mengacu pada Kebijakan MBKM: Kajian dan Pengembangan Teori di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya

Randi Rudiana¹, Ifah Khadijah², Usep Suherman³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: randirudiana4@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-03 Keywords: <i>MBKM; PTKI curriculum; Outcome-Based Education; Islamic values.</i>	<p>This study aims to analyze the implementation of the MBKM curriculum at STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya and to develop a theoretical model of MBKM curriculum implementation that is integrative and contextual for PTKI. This research employed a qualitative descriptive-analytical approach with a theory development design. Data were collected through in-depth interviews, analysis of curriculum and academic policy documents, and a review of relevant literature. Data analysis was conducted using an interactive qualitative model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity ensured through source and method triangulation. The findings indicate that MBKM implementation at STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya was carried out through curriculum restructuring and the reconstruction of Learning Outcomes based on Outcome-Based Education (OBE) integrated with Islamic values. Contextual MBKM learning activities were developed through da'wah practices, pesantren-based community engagement, and internships in educational and religious institutions. However, the implementation still faces challenges related to institutional readiness, faculty capacity, and systems for evaluation and recognition of learning outcomes. Based on these findings, this study proposes the Integrative-Contextual Model of MBKM Curriculum Implementation for PTKI, which positions Islamic values as the core foundation guiding curriculum design, learning implementation, strategic partnerships, and learning evaluation. This model is expected to serve as a conceptual and practical reference for PTKI in implementing the MBKM curriculum sustainably while maintaining their Islamic academic identity and mission.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-03 Kata kunci: <i>MBKM; Kurikulum PTKI; Outcome-Based Education; Nilai keislaman.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kurikulum MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya serta mengembangkan model teoretik implementasi kurikulum MBKM yang integratif dan kontekstual bagi PTKI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis dan pengembangan teori. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kurikulum dan kebijakan akademik, serta kajian literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya dilakukan melalui penyesuaian struktur kurikulum dan rekonstruksi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Bentuk kegiatan MBKM dikembangkan secara kontekstual melalui praktik dakwah, pengabdian masyarakat berbasis pesantren, dan magang di lembaga pendidikan serta keagamaan. Namun demikian, implementasi MBKM masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan kelembagaan, sumber daya dosen, serta sistem evaluasi dan pengakuan capaian pembelajaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Integratif-Kontekstual Implementasi Kurikulum MBKM PTKI yang menempatkan nilai keislaman sebagai inti (core value) dalam desain kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, kemitraan strategis, dan evaluasi pembelajaran. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi PTKI dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas keilmuan dan misi keislamannya.</p>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi

adaptif, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta karakter dan integritas moral yang kuat (Trilling & Fadel, 2009). Kondisi ini menuntut adanya inovasi kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masa depan dan relevansi dengan dunia kerja serta kehidupan sosial masyarakat. Kurikulum dalam pendidikan tinggi memiliki posisi strategis sebagai perangkat utama dalam mengarahkan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum tidak sekadar daftar mata kuliah, tetapi merupakan rancangan menyeluruh yang mencakup tujuan pendidikan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta sistem evaluasi yang terintegrasi (Mulyasa, 2018). Oleh karena itu, perubahan kebijakan pendidikan tinggi pada hakikatnya selalu bermuara pada perubahan dan pengembangan kurikulum.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menghadirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan ini memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama tiga semester di luar program studi, baik melalui pembelajaran lintas prodi maupun kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti magang, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat (Kemendikbud, 2020). MBKM bertujuan untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, memperkuat keterampilan abad ke-21, serta menumbuhkan kemandirian dan kreativitas mahasiswa.

Secara filosofis, kebijakan MBKM berakar pada prinsip humanistik dan konstruktivistik yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Outcome Based Education (OBE) yang menekankan capaian pembelajaran lulusan sebagai orientasi utama kurikulum pendidikan tinggi (Spady, 1994). Melalui MBKM, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar kontekstual yang bermakna dan mampu mengintegrasikan teori dengan praktik secara nyata. Namun demikian, implementasi kebijakan MBKM tidak dapat dilepaskan dari konteks dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki kekhasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang membedakannya dari perguruan tinggi umum. PTKI tidak hanya mengemban misi akademik, tetapi juga misi keagamaan, moral, dan sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam (Azra, 2017). Oleh karena itu, penerapan MBKM di PTKI memerlukan pendekatan yang tidak

sekadar normatif-administratif, tetapi juga konseptual dan filosofis.

Kurikulum pendidikan tinggi Islam secara ideal harus mampu mengintegrasikan antara ilmu keislaman (*ulum al-din*) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan sekaligus integritas moral dan spiritual (Nasution, 2019). Integrasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi MBKM, mengingat sebagian bentuk kegiatan MBKM lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pasar kerja yang bersifat umum. Tanpa kerangka teoritik yang jelas, implementasi MBKM berpotensi menggeser orientasi PTKI dari misi keislaman yang menjadi identitas utamanya. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi MBKM di PTKI masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan pemahaman konseptual dosen terhadap MBKM, minimnya mitra strategis yang relevan dengan keilmuan Islam, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam aktivitas pembelajaran MBKM (Zaini, 2021; Sutrisno, 2022). Dalam beberapa kasus, MBKM diimplementasikan secara parsial dan administratif, tanpa rekonstruksi kurikulum yang komprehensif dan berkelanjutan.

STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya sebagai salah satu PTKI swasta memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan Islam di tingkat lokal dan regional. Dengan visi pengembangan keilmuan Islam yang kontekstual dan berorientasi pada pengabdian masyarakat, STAI Al-Ruzhan dituntut untuk merespons kebijakan MBKM secara kreatif dan inovatif. Implementasi MBKM di STAI Al-Ruzhan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan regulasi nasional, tetapi juga pada penguatan karakter lulusan yang religius, berakhlak mulia, dan kompeten dalam bidang keilmuan serta praktik sosial keagamaan. Dalam konteks ini, implementasi kurikulum MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya memerlukan landasan teoritik yang kuat agar kebijakan tersebut tidak bersifat adopsi mekanis, melainkan adaptasi kritis berbasis nilai, visi, dan kebutuhan institusi. Pengembangan teori implementasi kurikulum MBKM PTKI menjadi penting untuk menjembatani antara kebijakan nasional dan karakteristik pendidikan tinggi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian implementasi kurikulum MBKM di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan studi pengembangan teori di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi kurikulum

MBKM dalam konteks PTKI, (2) mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, serta (3) mengembangkan kerangka teoritik implementasi kurikulum MBKM yang integratif dan kontekstual bagi PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori kurikulum pendidikan Islam serta menjadi rujukan praktis bagi PTKI dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM secara berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis dan pengembangan teori. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) serta merumuskan model teoretik implementasi kurikulum yang kontekstual dan berbasis nilai keislaman. Lokasi penelitian adalah STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, dengan subjek penelitian meliputi pimpinan perguruan tinggi dan dosen pengelola kurikulum MBKM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kurikulum dan kebijakan akademik, serta kajian literatur yang relevan. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis digunakan sebagai dasar pengembangan Model Integratif-Kontekstual Implementasi Kurikulum MBKM PTKI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kurikulum MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis dokumen kurikulum, pedoman akademik, serta wawancara mendalam dengan pimpinan dan dosen pengelola kurikulum, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya telah dilaksanakan secara bertahap, kontekstual, dan adaptif. Pelaksanaan kebijakan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang memiliki kekhasan dalam pengembangan keilmuan berbasis nilai-nilai Islam.

a) Penyesuaian Struktur Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya telah melakukan penyesuaian struktur kurikulum sebagai bentuk respons terhadap kebijakan MBKM. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengalokasikan ruang pembelajaran MBKM ke dalam struktur mata kuliah, sehingga mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menempuh sebagian beban studi melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi maupun di luar kampus. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas belajar serta memperluas pengalaman akademik dan profesional mahasiswa.

Implementasi penyesuaian struktur kurikulum tersebut tercermin dalam dokumen kurikulum dan pedoman akademik yang memuat pengakuan dan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) terhadap berbagai bentuk kegiatan MBKM. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan profil lulusan program studi, sehingga tetap memiliki relevansi akademik dan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyesuaian kurikulum MBKM di STAI Al-Ruzhan tidak menghilangkan mata kuliah inti keislaman yang menjadi ciri khas PTKI. Mata kuliah keilmuan Islam tetap dipertahankan sebagai fondasi utama kurikulum, sementara kegiatan MBKM diintegrasikan sebagai bagian dari penguatan kompetensi akademik, profesional, dan sosial mahasiswa. Integrasi ini mencerminkan upaya institusi dalam menyeimbangkan antara penguatan identitas keilmuan Islam dan tuntutan kebijakan nasional pendidikan tinggi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya menerapkan model adaptasi kurikulum MBKM yang bersifat integratif dan kontekstual. Model tersebut memungkinkan implementasi kebijakan MBKM tanpa menggeser nilai-nilai dasar dan karakter keilmuan institusi, sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

b) Rekonstruksi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya didahului oleh proses rekonstruksi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai landasan utama dalam pengembangan dan penyesuaian kurikulum. Rekonstruksi CPL ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan MBKM dengan visi keilmuan, profil lulusan, serta kebutuhan kompetensi mahasiswa sebagai calon sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Perumusan CPL di STAI Al-Ruzhan mengacu pada pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang menitikberatkan pada hasil belajar yang harus dicapai oleh lulusan. Dalam konteks ini, CPL dirumuskan secara komprehensif dengan mencakup empat unsur utama, yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Keempat unsur tersebut disusun secara terintegrasi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter dan kepekaan sosial yang kuat.

Aspek sikap dan tata nilai menekankan pembentukan karakter religius, integritas moral, tanggung jawab sosial, serta etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Aspek ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan kepribadian lulusan agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik, profesional, dan sosial. Sementara itu, aspek pengetahuan diarahkan pada penguasaan keilmuan Islam yang bersifat integratif dan kontekstual, dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Selanjutnya, aspek keterampilan umum difokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kerja sama tim, serta pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran. Keterampilan ini dipandang sebagai kompetensi esensial yang harus dimiliki lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan sosial. Adapun keterampilan khusus dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik keilmuan dan kompetensi keagamaan masing-masing program studi, sehingga

lulusan memiliki keahlian profesional yang relevan dan aplikatif.

Rekonstruksi CPL tersebut menjadi dasar utama dalam proses pengakuan dan penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui berbagai bentuk kegiatan MBKM. Dengan adanya CPL yang dirumuskan secara jelas dan terukur, kegiatan MBKM dapat dikonversi ke dalam sistem akademik STAI Al-Ruzhan secara akuntabel dan selaras dengan standar capaian pembelajaran program studi. Temuan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi CPL berperan strategis dalam menjembatani kebijakan MBKM dengan implementasi kurikulum yang berbasis pada karakter dan kebutuhan PTKI.

c) Bentuk Implementasi Program MBKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa serta karakteristik sosial-keagamaan masyarakat sekitar. Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), STAI Al-Ruzhan mengembangkan model implementasi MBKM yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai keislaman, sehingga kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari misi dakwah dan pengabdian kepada masyarakat.

Program MBKM yang dikembangkan meliputi praktik dakwah, pengabdian kepada masyarakat berbasis pesantren, serta magang di lembaga pendidikan dan keagamaan. Ketiga bentuk program tersebut dipilih karena dinilai relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan yang diharapkan, serta memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan teori dan praktik keilmuan Islam.

Praktik dakwah dilaksanakan melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam berbagai kegiatan dakwah dan pembinaan keagamaan di tengah masyarakat. Mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan ceramah, pengajian, pendampingan keagamaan, serta komunikasi sosial keislaman. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif, karena mahasiswa dapat mengimplementasikan teori dakwah, komunikasi Islam, dan juga bimbingan keagamaan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dakwah tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta kepercayaan diri mahasiswa.

Pengabdian kepada masyarakat berbasis pesantren menjadi salah satu bentuk implementasi MBKM yang menonjol di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dilibatkan dalam aktivitas pendidikan, pendampingan santri, pengelolaan kegiatan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabdian berbasis pesantren tidak hanya memperkuat kompetensi keilmuan dan pedagogik mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan kepekaan sosial, kemandirian, serta penghayatan terhadap nilai-nilai keislaman yang menjadi karakter lulusan PTKI. Selain itu, program magang di lembaga pendidikan dan keagamaan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi profesional mahasiswa. Mahasiswa mengikuti kegiatan magang di madrasah, sekolah Islam, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya yang relevan dengan bidang studi masing-masing. Melalui program magang ini, mahasiswa memperoleh pengalaman kerja nyata, pemahaman terhadap budaya organisasi, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan pengabdian masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa magang MBKM berperan penting dalam meningkatkan kesiapan lulusan untuk memasuki dunia profesional sekaligus menjalankan peran sosial-keagamaan di masyarakat.

d) Sistem Pengakuan dan Evaluasi Pembelajaran MBKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya telah mengembangkan sistem pengakuan dan evaluasi pembelajaran MBKM sebagai bagian integral dari implementasi kurikulum. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang diikuti mahasiswa melalui program MBKM memiliki kesetaraan akademik dengan pembelajaran reguler di dalam program studi. Pengakuan pembelajaran MBKM dilakukan melalui mekanisme konversi Satuan Kredit Semester (SKS) yang disesuaikan dengan beban dan

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Evaluasi pembelajaran MBKM di STAI Al-Ruzhan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah direkonstruksi berdasarkan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE). Penilaian dilakukan dengan memperhatikan ketercapaian aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus mahasiswa. Instrumen evaluasi yang digunakan meliputi laporan kegiatan, refleksi pembelajaran, portofolio, serta penilaian kinerja mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM.

Selain itu, proses penilaian melibatkan dosen pembimbing internal dan mitra eksternal sebagai pihak yang secara langsung memantau pelaksanaan kegiatan MBKM. Dosen pembimbing internal berperan dalam menilai kesesuaian kegiatan dengan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah, sedangkan mitra eksternal memberikan penilaian terhadap kinerja, kedisiplinan, dan juga profesionalisme mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Kolaborasi kedua pihak tersebut diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang objektif dan komprehensif. Namun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa sistem evaluasi pembelajaran MBKM di STAI Al-Ruzhan masih memerlukan penyempurnaan. Tantangan yang dihadapi antara lain belum optimalnya standarisasi instrumen penilaian serta perlunya sinkronisasi yang lebih intensif antara dosen pembimbing internal dan mitra eksternal. Perbedaan persepsi dalam memahami indikator penilaian dan capaian pembelajaran berpotensi memengaruhi konsistensi hasil evaluasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengakuan dan evaluasi pembelajaran MBKM telah berjalan, penguatan pada aspek regulasi internal, pedoman penilaian, dan koordinasi antarpihak masih perlu dilakukan. Penyempurnaan sistem evaluasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menjamin akuntabilitas, mutu pembelajaran, dan keberlanjutan implementasi MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya

e) Temuan Kunci Implementasi MBKM

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci

terkait implementasi kurikulum MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, yang mencerminkan upaya institusi dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI):

1) Penyesuaian Kurikulum dan Rekonstruksi CPL

Implementasi MBKM dilakukan melalui penyesuaian struktur kurikulum dan rekonstruksi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Proses ini memastikan bahwa program MBKM sejalan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, tetap mempertahankan mata kuliah inti keislaman, dan memberikan fleksibilitas belajar bagi mahasiswa.

2) Integrasi dengan Kegiatan Pembelajaran yang Kontekstual

MBKM diintegrasikan dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang relevan dengan karakter keislaman serta kebutuhan masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan tersebut meliputi praktik dakwah, pengabdian masyarakat berbasis pesantren, dan magang di lembaga pendidikan maupun keagamaan. Integrasi ini menjadikan kegiatan MBKM sebagai bagian dari penguatan kompetensi akademik, keagamaan, dan sosial mahasiswa.

3) Pengalaman Belajar Kontekstual dan Kompetensi Mahasiswa

Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aplikatif dan kontekstual melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan MBKM. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat penguasaan keilmuan dan keterampilan profesional, tetapi juga membentuk karakter, kepekaan sosial, serta penghayatan nilai-nilai keislaman, sesuai dengan profil lulusan PTKI.

4) Tantangan Teknis dan Evaluasi MBKM

Meskipun implementasi MBKM telah berjalan, institusi masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis pelaksanaan dan sistem evaluasi pembelajaran. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan penyempurnaan instrumen penilaian, standarisasi konversi SKS, serta koordinasi yang lebih intensif antara dosen pembimbing internal dan mitra eksternal.

Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan model teoritik implementasi kurikulum MBKM yang kontekstual bagi PTKI, di mana kebijakan MBKM dapat diterapkan secara adaptif tanpa menggeser identitas keilmuan Islam. Dengan pemahaman yang holistik terhadap implementasi MBKM, institusi dapat terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sehingga program MBKM tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kompetensi dan karakter lulusan.

2. Pengembangan Teori Implementasi Kurikulum MBKM PTKI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kurikulum MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritik implementasi kurikulum MBKM yang kontekstual bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pengembangan teori ini didasarkan pada analisis temuan empiris, sintesis teori kurikulum, serta karakteristik epistemologis dan aksiologis pendidikan tinggi Islam.

a) Landasan Filosofis Teori Implementasi MBKM PTKI

Teori implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berpijak pada pandangan filosofis bahwa pendidikan tinggi Islam tidak semata-mata bertujuan mencetak lulusan yang unggul secara akademik dan profesional, melainkan juga membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Pendidikan dalam perspektif Islam dipahami sebagai proses pembinaan manusia secara holistik yang mencakup dimensi intelektual, moral, spiritual, dan sosial secara terpadu (Al-Attas, 1993; Langgulung, 2004).

Dalam konteks tersebut, kebijakan MBKM tidak diposisikan hanya sebagai instrumen teknokratis untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memperkuat misi keislaman dan kebangsaan PTKI. Implementasi MBKM pada PTKI diarahkan agar mampu mengintegrasikan pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan

komunikasi dengan internalisasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan khazanah keilmuan Islam klasik maupun kontemporer (Kementerian Agama RI, 2020).

Secara filosofis, teori ini memadukan paradigma *Outcome Based Education* (OBE) dengan prinsip integrasi nilai-nilai Islam. OBE berfungsi sebagai kerangka teknis dan metodologis dalam pengembangan kurikulum yang menekankan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) sebagai orientasi utama proses pendidikan (Spady, 1994). Pendekatan ini selaras dengan kebijakan MBKM yang menuntut fleksibilitas pembelajaran, pengakuan pengalaman belajar di luar program studi, serta penekanan pada ketercapaian kompetensi nyata mahasiswa (Kemendikbud, 2020). Namun demikian, dalam konteks PTKI, OBE tidak diterapkan secara bebas nilai (*value neutral*), melainkan diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan normatif. Nilai-nilai tersebut berfungsi mengarahkan perumusan capaian pembelajaran, desain aktivitas MBKM, serta sistem evaluasi agar tidak hanya mengukur aspek kognitif dan keterampilan, tetapi juga sikap, etika, dan spiritualitas mahasiswa. Dengan demikian, MBKM di PTKI menjadi instrumen transformasi pendidikan yang *value laden*, selaras dengan visi pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal (Fauzi, 2019).

Integrasi OBE dan nilai-nilai Islam juga mencerminkan paradigma pendidikan Islam integratif-interkoneksi, yang berupaya menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam kerangka ini, kegiatan MBKM seperti magang, asistensi mengajar, proyek sosial, penelitian, dan kewirausahaan diposisikan sebagai wahana aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam konteks nyata kehidupan sosial dan profesional. Mahasiswa tidak hanya belajar *to know* dan *to do*, tetapi juga *to be* dan *to live together* berdasarkan prinsip rahmatan lil 'alamin (UNESCO, 1996; Amin Abdullah, 2010).

b) Prinsip-Prinsip Dasar Implementasi Kurikulum MBKM PTKI

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan teori implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam (PTKI) bertumpu pada empat prinsip dasar yang saling berkaitan dan bersifat integratif. Prinsip-prinsip ini dirumuskan untuk memastikan bahwa implementasi MBKM tidak hanya memenuhi tuntutan kebijakan nasional pendidikan tinggi, tetapi juga tetap konsisten dengan misi keilmuan, keislaman, dan pengabdian sosial PTKI.

1) Prinsip Integrasi Nilai Keislaman

Prinsip integrasi nilai keislaman menegaskan bahwa setiap bentuk kegiatan MBKM di PTKI harus mengandung dimensi penguatan nilai-nilai Islam, baik dalam aspek sikap (*attitude*), etika akademik dan profesional, maupun orientasi pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam tidak diposisikan sebagai pelengkap atau muatan simbolik, melainkan sebagai fondasi normatif yang menjiwai keseluruhan proses pembelajaran MBKM.

Internalisasi nilai keislaman dilakukan melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan reflektif, seperti magang berbasis etika Islam, proyek sosial-keagamaan, asistensi dakwah dan pendidikan, serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pendidikan Islam yang menekankan integrasi antara ilmu, iman, dan amal dalam satu kesatuan praksis pendidikan (Al-Attas, 1993; Langgung, 2004). Dengan demikian, MBKM di PTKI menjadi sarana pembentukan karakter religius dan moderat, bukan sekadar wahana penguatan kompetensi teknis.

2) Prinsip Fleksibilitas Akademik Kontekstual

Prinsip fleksibilitas akademik kontekstual menegaskan bahwa kebebasan belajar dalam MBKM tidak diterapkan secara seragam dan mekanistik, melainkan disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan PTKI, kebutuhan masyarakat lokal, serta visi keilmuan program studi. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi PTKI untuk mengembangkan model MBKM yang khas dan relevan dengan tradisi keilmuan Islam.

Dalam konteks PTKI, fleksibilitas akademik memungkinkan pengakuan terhadap bentuk-bentuk pembelajaran alternatif, seperti praktik dakwah

berbasis pesantren, pengabdian masyarakat keagamaan, riset keislaman terapan, maupun kewirausahaan sosial berbasis nilai Islam. Pendekatan ini sejalan dengan semangat MBKM yang mendorong rekognisi pembelajaran di luar kelas dan lintas konteks, sekaligus menjaga kekhasan identitas keilmuan PTKI (Kemendikbud, 2020; Kementerian Agama RI, 2020). Fleksibilitas yang kontekstual ini mencegah terjadinya reduksi MBKM menjadi sekadar adaptasi terhadap kebutuhan pasar kerja semata.

3) Prinsip Relevansi Sosial Keagamaan

Prinsip relevansi social keagamaan menempatkan implementasi MBKM sebagai instrumen untuk menjawab problem sosial dan keagamaan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan MBKM di PTKI tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri dan dunia usaha, tetapi juga pada penguatan peran lulusan sebagai agen perubahan sosial (*social change agents*) yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Melalui prinsip ini, mahasiswa PTKI didorong untuk terlibat aktif dalam pemecahan persoalan keumatan, seperti penguatan moderasi beragama, pemberdayaan masyarakat marginal, pendidikan keagamaan, serta pengembangan harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *rahmatan lil 'alamin* yang menempatkan pendidikan Islam sebagai kekuatan transformatif bagi kehidupan sosial (Abdullah, 2010; Fauzi, 2019). Dengan demikian, MBKM di PTKI memiliki orientasi ganda, yakni relevansi profesional dan relevansi sosial-keagamaan secara simultan.

4) Prinsip Keberlanjutan dan Penjaminan Mutu

Prinsip keberlanjutan dan juga penjaminan mutu menegaskan bahwa implementasi kurikulum MBKM PTKI harus didukung oleh sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Setiap kegiatan MBKM harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan.

Evaluasi pembelajaran MBKM dilakukan secara sistematis melalui

mekanisme monitoring, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang menekankan keterukuran hasil belajar serta akuntabilitas akademik (Spady, 1994). Dalam konteks PTKI, penjaminan mutu juga mencakup aspek kesesuaian nilai, etika, dan kontribusi sosial kegiatan MBKM terhadap visi keislaman institusi, sehingga keberlanjutan program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan kultural.

c) Komponen Teori Implementasi Kurikulum MBKM PTKI

Pengembangan teori implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mencakup lima komponen utama yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistemik. Kelima komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa implementasi MBKM berjalan secara terarah, kontekstual, dan selaras dengan visi keislaman PTKI, sekaligus memenuhi standar mutu pendidikan tinggi nasional.

1) Visi Keislaman Institusi

Visi keislaman institusi merupakan titik awal sekaligus orientasi utama dalam implementasi kurikulum MBKM PTKI. Visi ini berfungsi sebagai *guiding philosophy* yang mengarahkan seluruh kebijakan akademik, termasuk perumusan kurikulum, pemilihan bentuk kegiatan MBKM, serta mekanisme evaluasi pembelajaran. Implementasi MBKM tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi PTKI yang menekankan integrasi antara keilmuan, keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perspektif pendidikan Islam, visi institusi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan normatif, karena mencerminkan cita-cita pembentukan insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Al-Attas, 1993). Oleh karena itu, setiap kebijakan MBKM di PTKI harus diturunkan secara konsisten dari visi keislaman tersebut agar tidak terjadi disorientasi antara tuntutan kebijakan nasional dan identitas keilmuan Islam PTKI.

2) Desain Kurikulum Berbasis OBE Islamic Values

Komponen kedua adalah desain kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam (*Islamic values*). Kurikulum MBKM PTKI dirancang dengan menempatkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai orientasi utama, yang dirumuskan secara integratif antara kompetensi akademik, profesional, sosial, dan keislaman. Pendekatan OBE digunakan sebagai kerangka metodologis untuk menjamin keterukuran dan juga akuntabilitas capaian pembelajaran, sementara nilai-nilai Islam berfungsi sebagai landasan normatif yang menjiwai tujuan dan proses pembelajaran. Dengan demikian, CPL tidak hanya mencerminkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap religius, etika profesional, serta komitmen terhadap nilai moderasi beragama dan kemaslahatan umat (Spady, 1994; Kementerian Agama RI, 2020). Integrasi ini sejalan dengan paradigma pendidikan Islam integratif-interkoneksi yang berupaya menghapus dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (Abdullah, 2010).

3) Bentuk Pembelajaran MBKM Kontekstual

Bentuk pembelajaran MBKM merupakan komponen operasional yang merepresentasikan implementasi kurikulum secara nyata. Dalam konteks PTKI, bentuk kegiatan MBKM dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakter keilmuan dan kekhasan institusi, seperti kegiatan dakwah dan penyuluhan keagamaan, asistensi mengajar pendidikan Islam, pengabdian masyarakat berbasis keagamaan, riset keislaman terapan, serta pengelolaan lembaga pendidikan dan social keagamaan. Kontekstualisasi bentuk MBKM ini penting agar pembelajaran tidak terlepas dari realitas sosial-keagamaan yang menjadi medan pengabdian lulusan PTKI. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya berorientasi pada dunia industri, tetapi juga pada penguatan peran sosial-keagamaan sebagai bagian dari misi *rahmatan lil 'alamin* pendidikan Islam

(Fauzi, 2019). Dengan demikian, MBKM di PTKI menjadi sarana aktualisasi nilai keislaman dalam konteks kehidupan nyata.

4) Kemitraan Strategis Keagamaan dan Sosial

Implementasi MBKM PTKI tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan kemitraan strategis yang relevan. Oleh karena itu, komponen keempat dalam teori ini adalah pengembangan kemitraan dengan berbagai lembaga keagamaan dan sosial, seperti pesantren, masjid, madrasah, lembaga zakat dan wakaf, organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi pemerintah dan swasta yang memiliki kesesuaian visi dengan PTKI. Kemitraan ini berfungsi sebagai *learning ecosystem* yang menyediakan ruang belajar kontekstual bagi mahasiswa sekaligus menjamin relevansi dan keberlanjutan program MBKM. Dalam perspektif MBKM, kemitraan bukan hanya hubungan administratif, tetapi relasi kolaboratif yang memungkinkan transfer nilai, pengalaman, dan kompetensi secara timbal balik (Kemendikbud, 2020). Bagi PTKI, kemitraan strategis juga menjadi sarana penguatan jejaring dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

5) Sistem Evaluasi dan Pengakuan Capaian Pembelajaran

Komponen terakhir adalah sistem evaluasi dan pengakuan capaian pembelajaran MBKM. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme pengakuan satuan kredit semester (SKS) berbasis CPL, penilaian kinerja mahasiswa selama kegiatan MBKM, serta refleksi pembelajaran yang terstruktur dan terukur. Penilaian tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses, sikap, dan internalisasi nilai selama kegiatan berlangsung. Sistem evaluasi ini harus terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal PTKI agar implementasi MBKM berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *continuous quality improvement* dalam OBE, yang menekankan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran (Spady, 1994).

d) Model Teoretik Implementasi Kurikulum MBKM PTKI

Berdasarkan landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, dan komponen utama implementasi kurikulum MBKM PTKI, teori implementasi ini dirumuskan dalam suatu Model Integratif Kontekstual MBKM PTKI. Model ini merupakan kerangka teoretik yang memadukan fleksibilitas kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan integrasi nilai-nilai Islam serta orientasi pada kebutuhan sosial keagamaan masyarakat. Model Integratif Kontekstual MBKM PTKI berangkat dari asumsi dasar bahwa kebijakan MBKM bersifat terbuka dan adaptif, sehingga memerlukan proses kontekstualisasi agar selaras dengan karakter, visi, dan misi PTKI. Oleh karena itu, fleksibilitas yang ditawarkan oleh MBKM tidak diterapkan secara normatif-administratif semata, tetapi diarahkan secara ideologis dan pedagogis oleh nilai-nilai keislaman sebagai identitas utama PTKI. Dengan pendekatan ini, implementasi MBKM tidak kehilangan arah normatif dan tetap berada dalam koridor tujuan pendidikan Islam.

Secara struktural, model ini menempatkan nilai keislaman sebagai inti (*core value*) yang menjadi pusat penggerak seluruh proses implementasi MBKM. Nilai keislaman tersebut berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan desain kurikulum, pemilihan bentuk pembelajaran MBKM, pengembangan kemitraan, serta sistem evaluasi capaian pembelajaran. Nilai-nilai seperti keimanan, akhlak mulia, moderasi beragama, tanggung jawab sosial, dan etika profesional menjadi parameter utama dalam menentukan kualitas dan kebermaknaan implementasi MBKM di PTKI.

Dalam kerangka model ini, desain kurikulum berbasis OBE Islamic Values berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional MBKM dan visi keislaman institusi. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan secara integratif, mencakup kompetensi akademik, profesional, sosial, dan keagamaan, sehingga kegiatan MBKM tidak hanya menghasilkan *job ready graduates*, tetapi juga *value-driven graduates*. Pendekatan *Outcome-Based Education* memastikan keterukuran capaian pembelajaran, sementara nilai-

nilai Islam menjamin arah dan orientasi etik pembelajaran.

Selanjutnya, fleksibilitas pembelajaran MBKM dalam model ini diposisikan sebagai *instrumen* atau *sarana* pedagogis, bukan sebagai tujuan akhir. Fleksibilitas dimanfaatkan untuk membuka ruang pembelajaran lintas konteks, seperti dakwah dan pendidikan Islam, pengabdian masyarakat berbasis keagamaan, riset terapan keislaman, serta pengelolaan lembaga sosial-keagamaan. Dengan demikian, fleksibilitas MBKM berfungsi memperkaya pengalaman belajar mahasiswa tanpa melepaskan diri dari konteks sosial-keagamaan yang menjadi medan pengabdian lulusan PTKI.

Model Integratif Kontekstual MBKM PTKI juga menekankan pentingnya interaksi dinamis antara institusi, mahasiswa, dan mitra strategis dalam satu ekosistem pembelajaran. Kemitraan dengan pesantren, masjid, madrasah, lembaga sosial keagamaan, dan instansi terkait dipandang sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, bukan sekadar lokasi magang. Dalam kerangka ini, MBKM menjadi medium pembelajaran transformatif yang menghubungkan teori akademik, nilai keislaman, dan realitas sosial secara simultan.

Pada aspek evaluasi, model ini menegaskan bahwa pencapaian kompetensi keagamaan-profesional merupakan tujuan utama implementasi MBKM PTKI. Evaluasi tidak hanya dilakukan melalui pengakuan SKS berbasis CPL, tetapi juga melalui penilaian kinerja, refleksi pembelajaran, dan pengukuran internalisasi nilai keislaman. Sistem evaluasi ini terintegrasi dengan penjaminan mutu internal PTKI untuk memastikan keberlanjutan, konsistensi, dan akuntabilitas implementasi MBKM.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil kajian dan pengembangan teori implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan MBKM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memerlukan pendekatan yang adaptif, integratif, dan kontekstual agar selaras dengan karakter keilmuan dan misi

keislaman institusi. MBKM tidak dapat diimplementasikan secara normatif-administratif semata, melainkan harus disertai rekonstruksi kurikulum yang berbasis nilai, visi institusi, dan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya telah melakukan penyesuaian struktur kurikulum dan rekonstruksi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE) sebagai fondasi utama implementasi MBKM. Rekonstruksi CPL dilakukan secara integratif dengan mengakomodasi aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Langkah ini memungkinkan kegiatan MBKM diakui secara akademik tanpa menghilangkan mata kuliah inti keislaman yang menjadi ciri khas PTKI.

Bentuk implementasi MBKM di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya diwujudkan melalui kegiatan yang kontekstual dan relevan dengan misi keislaman, seperti praktik dakwah, pengabdian masyarakat berbasis pesantren, serta magang di lembaga pendidikan dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang aplikatif dan bermakna bagi mahasiswa, tidak hanya dalam penguatan kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga dalam pembentukan karakter religius, kepekaan sosial, dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi MBKM, khususnya pada aspek kesiapan kelembagaan, kesiapan sumber daya dosen, serta sistem evaluasi dan pengakuan capaian pembelajaran. Standarisasi instrumen penilaian, sinkronisasi antara dosen pembimbing internal dan mitra eksternal, serta penguatan sistem penjaminan mutu internal masih perlu disempurnakan agar implementasi MBKM berjalan lebih konsisten dan akuntabel.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan suatu Model Teoretik Implementasi Kurikulum MBKM PTKI yang dirumuskan sebagai Model Integratif Kontekstual MBKM PTKI. Model ini menempatkan nilai keislaman sebagai inti (core value) yang mengarahkan desain kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, kemitraan strategis, dan evaluasi capaian pembelajaran MBKM. Fleksibilitas kebijakan MBKM diposisikan sebagai sarana pedagogis, sementara pencapaian kompetensi

keagamaan-profesional dan relevansi sosial-keagamaan menjadi tujuan utama implementasi kurikulum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi MBKM di PTKI dapat berjalan secara efektif dan bermakna apabila dikembangkan melalui pendekatan integratif yang memadukan kebijakan nasional, nilai-nilai Islam, dan konteks sosial masyarakat. Temuan dan model teoretik yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi PTKI dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas keilmuan dan misi keislamannya.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan Mengacu Pada Kebijakan MBKM: Kajian dan Pengembangan Teori di STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2010). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, A. (2019). Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Filosofis dan Praktis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 215–230.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Pengembangan Kurikulum PTKI Berbasis MBKM*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.

- Langgulung, H. (2004). *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2019). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Spady, W. G. (1994). *Outcome Based Education: Critical Issues and Answers*. Arlington, VA: American Association of School Administrators.
- Sutrisno. (2022). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi keagamaan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 23–38.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey Bass.
- UNESCO. (1996). *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO Publishing.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Zaini, H. (2021). Inovasi kurikulum PTKI dalam merespons kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 145–160.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Kencana